

Draft Rencana Aksi
Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019 (Kanwil dan PTKN)

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Program Kerja Satuan Kerja	Unit Kerja Terkait	Kriteria Keberhasilan	Indikator 2015-2017	Indikator 2018	Indikator 2019
I. MANAJEMEN PERUBAHAN							
Fokus: Memperkuat Peran, Ukuran dan Target Pokja Secara Berkala dan Optimalisasi Agen Perubahan							
1	Mengupayakan pembentukan agen perubahan (<i>agent of change</i>) pada seluruh unit kerja secara formal	Penyusunan/penyempurnaan regulasi tentang pembentukan agen perubahan pada Kementerian Agama	Seluruh Unit Eselon I Pusat	Adanya dasar hukum pedoman kerja bagi agen perubahan dalam melakukan tugas dan fungsinya	Penyempurnaan Tersusunnya regulasi tentang pembentukan agen perubahan pada Kementerian Agama	Terimplementasikannya regulasi tentang pembentukan agen perubahan pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama (100%) satker telah memiliki <i>agent of change</i>)	
2	Meningkatkan kompetensi agen perubahan dengan mengadakan pengembangan kompetensi atau pelatihan tentang manajemen perubahan	Pelaksanaan Workshop dan Bimtek Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah	Seluruh Unit Eselon I Pusat dan Unit Kerja Daerah	Optimalnya Peran Agen Perubahan Kementerian Agama dalam melakukan analisis masalah, memberikan solusi serta inovasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi	Tersusunnya rekomendasi program kerja dan proyeksi anggaran dalam mensinergikan RENSTRA, IKU dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019	Terbentuknya Agen Perubahan Kementerian Agama baik di Pusat dan Daerah yang memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan	
3	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas ukuran dan target masing masing area perubahan yang bertujuan untuk melihat sejauhmana perkembangan pembangunan reformasi di setiap area perubahan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala atas kemajuan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada Kementerian Agama	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB, Unit Kerja Daerah	Terwujudnya <i>money follow program</i> yang sesungguhnya (kualitas kegiatan yang berorientasi pada <i>outcome</i>) sehingga program dan kegiatan pada semua unit kerja sesuai dengan sinergitas RENSTRA, IKU dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama	Terukurinya Indeks Capaian Area Perubahan Reformasi Birokrasi berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama		
					Tersusunnya draft program kerja Kementerian Agama yang sesuai dengan sinergitas RENSTRA, IKU dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019	Tersusunnya program kerja Kementerian Agama yang sesuai dengan sinergitas RENSTRA, IKU dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019	Tersusunnya evaluasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi serta draft road map reformasi birokrasi 2020-2025
					Tersusunnya draft revisi RKA-KL 2017 dan proyeksi RKA-KL 2018 pada seluruh unit kerja yang sesuai dengan sinergitas RENSTRA, IKU dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019 dalam menentukan program dan kegiatan	Tersusunnya RKA-KL 2018 dan draft RKA-KL 2019 pada seluruh unit kerja yang sesuai dengan sinergitas RENSTRA, IKU dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019 dalam menentukan program dan kegiatan	Tersusunnya RKA-KL 2019 dan draft RKA-KL 2020 pada seluruh unit kerja yang sesuai dengan sinergitas RENSTRA, IKU dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2020-2025 dalam menentukan program dan
					Terukurinya kinerja Pokja RB dalam mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi pada setiap delapan area perubahan		
		Pelaksanaan <i>Reform Corner</i> pada masing-masing satuan kerja organisasi secara berkala yang melibatkan pimpinan tinggi pada satuan kerjanya masing-masing	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB, Unit Kerja Daerah	Terlaksananya <i>transfer knowledge</i> dan evaluasi serta rencana kerja reformasi birokrasi	Terwujudnya budaya <i>reform corner</i> sebagai sarana dalam melakukan perubahan organisasi yang lebih baik pada sebagian satuan kerja	Terwujudnya budaya <i>reform corner</i> sebagai sarana dalam melakukan perubahan organisasi yang lebih baik pada seluruh satuan kerja	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Program Kerja Satuan Kerja	Unit Kerja Terkait	Kriteria Keberhasilan	Indikator 2015-2017	Indikator 2018	Indikator 2019
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (EVALUASI PERUNDANG-UNDANGAN) *Pusat (satker daerah bisa memberikan masukan)							
Fokus : Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan secara berkala							
1	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan secara berkala	Monitoring dan Evaluasi terhadap penataan berbagai perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Agama	Biro Hukum	Menurunnya volume regulasi perundang-undangan yang tumpang tindih	Tersusunnya regulasi yang mengatur tentang deregulasi perundang-undangan yang tumpang tindih	Terbitnya regulasi yang mengatur tentang deregulasi perundang-undangan yang tumpang tindih	Terwujudnya regulasi yang tidak tumpang tindih sesuai arahan presiden
		Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tingkat kementerian dan program legislasi kementerian secara berkala	Biro Hukum	Menurunnya volume regulasi perundang-undangan yang tumpang tindih	Teridentifikasinya jumlah peraturan tingkat kementerian dan program legislasi kementerian	Terwujudnya peraturan tingkat kementerian dan program legislasi kementerian yang sinkron	
		Pembangunan aplikasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan	Biro Hukum	Meningkatnya efektifitas pengendalian peraturan perundang-undangan	Tersusunnya regulasi dan grand design aplikasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan	Terbangunnya regulasi dan <i>grand design</i> aplikasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan	Terukurinya jumlah regulasi yang sudah tidak relevan/tidak berlaku
		Program konsultasi dan pendampingan hukum	Biro Hukum	Optimalnya program konsultasi dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi program konsultasi dan pendampingan hukum	Terimplementasinya regulasi program konsultasi dan pendampingan hukum	
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI *Pusat (satker daerah bisa memberikan masukan)							
Fokus : Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar satuan kerja, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik							
1	Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi organisasi dengan mengajukan perubahan organisasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan	Melakukan kajian, evaluasi, tindak lanjut mengenai desain organisasi untuk praktek analisis jabatan yang harmonis	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB, Unit Kerja Daerah	Terwujudnya restrukturisasi organisasi yang efektif dan efisien serta menghasilkan sistem yang simultan dengan sistem tatalaksana, dan sistem manajemen SDM mengikuti perubahan organisasi sehingga dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan SDM sesuai dengan kompetensi dan kuantitasnya	Tersusunnya regulasi tindak lanjut atas penyempurnaan organisasi dengan terbitnya regulasi (yang sesuai dengan alur peringkat jabatan)	Terimplementasinya regulasi tindak lanjut atas penyempurnaan organisasi dengan terbitnya regulasi (yang sesuai dengan alur peringkat jabatan)	Tersusunnya rekomendasi atas pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang efektif dan efisien dan dijadikan sebagai referensi untuk membuat proyeksi kebutuhan organisasi tahun 2020-2025
					Terukurinya Indeks kelembagaan	Tersusunnya laporan rekomendasi hasil evaluasi efektifitas kelembagaan	Terlaksananya tindak lanjut dari laporan hasil rekomendasi evaluasi efektifitas kelembagaan
					Terukurinya % satuan kerja yang tepat fungsi dan ukuran	Tersusunnya laporan rekomendasi satuan kerja yang tepat fungsi dan ukuran	Terlaksananya tindak lanjut dari laporan hasil rekomendasi satuan kerja yang tepat fungsi dan
		Penyusunan Analisis Beban Kerja	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Teridentifikasinya persentase atau jumlah PNS yang proporsional dan profesional dalam bekerja	Tersusunnya laporan rekomendasi tentang evaluasi jabatan, spesifikasi jabatan serta peta jabatan	Terukurinya penilaian standar norma waktu serta otomasi ABK	Terbangunnya sistem otomasi ABK
IV. PENATAAN TATA LAKSANA							
Fokus : Mendorong sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang efisiensi, dan efektivitas birokrasi serta implementasi pengembangan e-government yang terintegrasi (terpadu)							
1	Melakukan revisi Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada dengan mengacu pada peta proses bisnis yang baru	Penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Meningkatnya jumlah % indeks ketatalaksanaan pada satuan kerja	Tersusunnya regulasi tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada dengan mengacu pada peta proses bisnis yang baru	Terlaksananya pemutakhiran SOP pada Kementerian Agama	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Program Kerja Satuan Kerja	Unit Kerja Terkait	Kriteria Keberhasilan	Indikator 2015-2017	Indikator 2018	Indikator 2019
					Teridentifikasinya jumlah SOP pada Kementerian Agama		

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Program Kerja Satuan Kerja	Unit Kerja Terkait	Kriteria Keberhasilan	Indikator 2015-2017	Indikator 2018	Indikator 2019
2	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Terimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing satuan kerja	Tersusunnya regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya peran PPID yang semakin optimal	Berkembangnya kebiasaan memberikan akses informasi birokrasi
					Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2016 (100% dari 9 variabel plus indikator dengan penyesuaian) terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Agama yang mencakup perbaikan di 9 produk layanan		
3	Mengoptimalkan <i>e-government</i>	Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing satuan kerja	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB, Tim e-Gov	Meningkatnya jumlah % indeks <i>e-government</i>	Tersusunnya regulasi tentang penguatan implementasi <i>e-Government</i> yang terpadu	Tersosialisasikannya Grand Design <i>e-Gov</i> (PTSP)	
					Teridentifikasi layanan yang siap PTSP dengan prioritas Ombudsman dan hasil asesmen	Terintegrasinya sistem informasi dan data PTSP melalui Data Center, mekanisme Warehouse, dan aplikasi yang user friendly	
					Terbentuknya UPT yang mengelola layanan terpadu	Tersedianya Command Room & Application yang digunakan pimpinan	

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Fokus : Sistem Manajemen SDM ASN yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional

1	Peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi, melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Seluruh Unit Eselon I Pusat	Terwujudnya Perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Tersusunnya dokumen bezzeting pegawai, rencana redistribusi, proyeksi kebutuhan pegawai dan perhitungan formasi jabatan	Tersusunnya regulasi tentang bezzeting pegawai, rencana redistribusi, proyeksi kebutuhan pegawai dan perhitungan formasi jabatan	Terimplementasikannya regulasi tentang bezzeting pegawai, rencana redistribusi, proyeksi kebutuhan pegawai dan perhitungan formasi jabatan
		Proses penerimaan pegawai dan promosi jabatan transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN		Menghasilkan pegawai yang profesional dan kompeten	Tersusunnya dokumen proses penerimaan pegawai dan promosi jabatan transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Terimplementasikannya proses penerimaan pegawai dan promosi jabatan transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas kerja SDM	Teridentifikasikannya kebutuhan pengembangan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	Terimplementasikannya pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
						Terimplemtasikannya monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Program Kerja Satuan Kerja	Unit Kerja Terkait	Kriteria Keberhasilan	Indikator 2015-2017	Indikator 2018	Indikator 2019
		Penetapan pengukuran kinerja individu		Meningkatnya kinerja organisasi berdasarkan kinerja individu pegawai dengan sistem pemberian remunerasi dengan berbasis kinerja	Tersusunnya regulasi pengukuran kinerja individu Penetapan sistem penilaian kinerja individu dikaitkan dengan kinerja organisasi serta memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya (cascading)	Terbangunnya sistem yang terintegrasi terkait dengan pengukuran kinerja individu Penetapan sistem penilaian kinerja individu dikaitkan dengan kinerja organisasi serta memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya (cascading)	Terimplementasikannya sistem pemberian remunerasi dengan berbasis kinerja
		Penyusunan kode etik pegawai		Adanya pemberian <i>reward and punishment</i> kepada seluruh pegawai di setiap unit organisasi	Tersusunnya regulasi tentang kode etik pegawai	Terimplementasikannya regulasi tentang kode etik pegawai	Terukurnya rasio disiplin pegawai
		Restrukturisasi Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>One Stop Service</i>		Optimalnya fungsi SIMPEG dalam mendukung layanan kepegawaian yang berbasis online serta berfungsi dalam pengambilan kebijakan manajemen SDM	Tersusunnya regulasi Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis One Stop Service	Terbangunnya SIMPEG dengan sistem presensi, sistem penggajian, pemberian remunerasi, sistem kinerja pegawai, dan layanan pegawai (kenaikan pangkat, KGB via sms online)	Terintegrasikannya SIMPEG dengan sistem presensi, sistem penggajian, pemberian remunerasi, sistem kinerja pegawai, dan layanan pegawai (kenaikan pangkat, KGB via sms)
2	Melakukan penyusunan mekanisme <i>reward and punishment</i>	Penyusunan regulasi tentang mekanisme <i>reward and punishment</i>	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB. Fasilitator: Sekretariat Jenderal	Penilaian prestasi kinerja pegawai semakin obyektif	Tersusunnya regulasi mekanisme <i>reward and punishment</i>	Terimplementasikannya mekanisme <i>reward and punishment</i> dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang obyektif pada seluruh satuan kerja pusat dan daerah	

VI. Penguatan Akuntabilitas

Fokus : Sistem Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kerjanya sesuai dengan sumber-sumber yang dipergunakannya

1	Mengoptimalkan pimpinan pada saat penyusunan renstra dan perjanjian kinerja	Reviu pelaksanaan renstra dan perjanjian kinerja yang melibatkan pimpinan	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Selarasnya kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	Tersusunnya regulasi terkait penyalarsan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui penyempurnaan Renstra 2015-2019	Terimplementasikannya regulasi terkait penyalarsan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui penyempurnaan Renstra 2015-2019	
		Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Meningkatnya akuntabilitas satuan kerja organisasi	Terukurnya akuntabilitas kinerja satuan kerja	Optimalnya capaian kinerja organisasi	
2	Pimpinan tertinggi Kementerian Agama terlibat secara langsung dalam melakukan pemantauan kinerja secara berkala	Evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan tertinggi secara berkala	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Terlaksananya proses pemantauan capaian kinerja secara langsung oleh pimpinan tertinggi dalam mengambil kebijakan	Terukurnya % capaian kinerja organisasi		
3	Mengoptimalkan kapasitas SDM ASN Kementerian Agama dengan mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan organisasi	Perancangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi dan bisa diakses oleh seluruh unit organisasi/individu	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Meningkatkan kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu serta terwujudnya pemberian remunerasi berbasis kinerja	Tersusunnya regulasi integrasi sistem pengukuran kinerja dengan organisasi	Terbangunnya regulasi integrasi sistem pengukuran kinerja dengan organisasi berbasis elektronik	Terimplementasikannya pemberian remunerasi berbasis kinerja

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Program Kerja Satuan Kerja	Unit Kerja Terkait	Kriteria Keberhasilan	Indikator 2015-2017	Indikator 2018	Indikator 2019
VII. Penguatan Pengawasan							
Fokus : Meningkatkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN							
1	Melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)	Sosialisasi penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) dengan melibatkan seluruh unit eselon I	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Meningkatnya: a. Opini LKKA WTP b. Kapabilitas APIP yang mumpuni c. Tersedianya satuan kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM	Tersusunnya laporan reviu atas pelaksanaan regulasi tentang penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)	Terukurinya jumlah laporan pelaksanaan regulasi tentang penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)	Tersusunnya rekomendasi atas pelaksanaan regulasi tentang penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) di Kementerian Agama
		Penguatan peran Aparat Intern Instansi Pemerintah (APIP)	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB		Terukurinya peran APIP yang berfokus pada client dan audit berbasis risiko		
					Terukurinya peran APIP sebagai pihak <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan		
2	Melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif terhadap unit kerja dan melakukan pembangunan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Penilaian Mandiri Pelaksanaan ZI WBK/WBBM	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB		Tersusunnya regulasi terkait dengan Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan ZI WBK/WBBM untuk seluruh satuan kerja	Terbangunnya Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan ZI WBK/WBBM untuk seluruh satuan kerja	Terimplementasikannya zona integritas secara intensif terhadap unit kerja dan melakukan pembangunan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
Fokus : Meningkatkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN							
1	Membuat inovasi sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar layanan	Penyusunan regulasi tentang inovasi sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Terukurinya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Agama	Tersusunnya regulasi tentang inovasi sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan		
2	Melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam melakukan pelayanan terhadap stakeholders	Pelaksanaan penilaian inovasi pelayanan publik	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Berkembangnya inovasi layanan pada Kementerian Agama			
		Mengembangkan E-Government pada seluruh pelayanan	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan (call center, sms, mobile app)			
3	Melakukan survey atas inisiatif instansi untuk mengevaluasi atas kepuasan pelayanan yang hasilnya dapat diakses secara terbuka dan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan	Pelaksanaan survei layanan publik	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Meningkatnya Survei harapan publik terhadap layanan prioritas			
		Penguatan regulasi standar pelayanan	Seluruh Unit Eselon I Pusat, Pokja RB	Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat			

CATATAN
Koordinasi Biro Ortala
Koordinasi Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN, Biro Ortala
Koordinasi Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN, Biro Ortala
Koordinasi Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN, Biro Ortala
Koordinasi Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN, Biro Ortala

CATATAN

Koordinasi dengan bagian hukum seluruh unit kerja

Koordinasi dengan bagian hukum seluruh unit kerja

Koordinasi dengan bagian hukum seluruh unit kerja

Koordinasi dengan bagian hukum seluruh unit kerja

Koordinasi Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan

Koordinasi Biro Kepegawaian, Itjen

Koordinasi Biro Kepegawaian, Itjen

Koordinasi Biro Kepegawaian

Koordinasi dengan Biro Ortala

CATATAN

Koordinasi dengan Biro
Ortala

CATATAN
Koordinasi dengan Biro Masdatin, Biro Ortala
Koordinasi dengan Biro Masdatin, Biro Ortala
Koordinasi dengan Biro Masdatin, Biro Ortala
Koordinasi dengan Biro Masdatin, Biro Umum
Koordinasi dengan Biro Masdatin, Biro Umum
Koordinasi Biro Kepegawain dan Biro Ortala
Koordinasi Biro Kepegawain dan Biro Ortala
Koordinasi Biro Kepegawain dan Biro Ortala
Koordinasi Biro Kepegawain dan Biro Ortala

CATATAN

Koordinasi Biro
Kepegawain dan Biro
Ortala

Koordinasi Biro
Kepegawain dan Biro
Ortala

Koordinasi Biro
Kepegawain dan Biro
Ortala

Koordinasi dengan
seluruh Biro dan Pusat
Setjen, Itjen

Koordinasi Biro
Kepegawaian, Biro
Perencanaan dan Biro
Keuangan

Koordinasi Biro
Kepegawaian, Biro
Perencanaan dan Biro
Keuangan

Koordinasi Biro
Kepegawaian, Biro
Perencanaan dan Biro
Keuangan

Koordinasi Biro
Kepegawaian, Biro
Perencanaan dan Biro
Keuangan, Biro Ortala

CATATAN



Biro Ortala dan Itjen

Biro Ortala dan Itjen



Biro Ortala dan Itjen



Biro Ortala, Biro Masdatin, Unit Eselon I Pusat

Biro Ortala, Biro Masdatin, Unit Eselon I Pusat

Biro Ortala, Biro Masdatin, Unit Eselon I Pusat

Biro Ortala, Biro Masdatin, Unit Eselon I Pusat

Biro Ortala, Biro Masdatin, Unit Eselon I Pusat